Sejarah dan Budaya:
Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index

Research Article

Budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro tahun 1942-1945

Jatropha cultivation during the Japanese occupation in the Bojonegoro Residency in 1942-1945

Mila Zufaidah, Grace Tjandra Leksana
mila.zufaidah.1907326@students.um.ac.id, grace.leksana.fis.@um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia
Corresponding email: mila.zufaidah.19073263@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Received: June 08, 2023
Revised: June 13, 2023
Accepted: June 16, 2023
Published: June 30, 2023

Permalink/DOI

10.17977/um020v17i12023p81-91

Copyright © 2023.
Sejarah dan Budaya
Email: jsb.journal@um.ac.id
Print ISSN: 1979-9993
Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Zufaidah, M.,& Leksana, G. T. (2023). Budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro tahun 1942-1945. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 17*(1), 81-91. https://dx.doi.org/10.17977/um020v17i12023p81-91

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

This article describes the cultivation of jatropha plant which was intensified during the Japanese occupation of the Bojonegoro Residency. Jatropha is a plant whose seeds contain oil which can be used as lubricating oil for weapons and ship engines. Therefore, the government made a strategy for planting jatropha to increase jatropha production in Bojonegoro. This raises the research question what is this historical background of the Bojonegoro Residency? How did the Japanese government implement the strategy of planting jatropha as a result of war economic policies in the Bojonegoro Residency? This research uses the historical method, which in the writing process uses primary sources in the form archives (newspaper, magazine and poster). The author found that the jatropha planting strategy from the Japanese government only increased jatropha yields by intensifying land use, making propaganda, and limiting the distribution of jatropha seeds so they would not leave the production area.

KEYWORDS

Japan; jatropha plant; Bojonegoro

ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan budidaya tanaman jarak yang digiatkan selama pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro. Tanaman jarak merupakan tanaman yang bijinya mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai minyak pelumas senjata dan mesin-mesin kapal. Oleh sebab itu pemerintah membuat strategi atas penanaman jarak untuk meningkatkan produksi jarak di Bojonegoro. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana latar historis Karesidenan Bojonegoro? Bagaimana pemerintah Jepang mengimplementasikan strategi penanaman jarak sebagai dampak kebijakan ekonomi perang di Karesidenan Bojonegoro? Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang dalam proses penulisannya menggunakan sumber primer berupa arsip (surat kabar, majalah dan poster). Penulis menemukan fakta bahwa strategi penanaman jarak dari pemerintah Jepang hanya untuk melipat gandakan hasil jarak yang dilakukan dengan mengintensifkan penggunaan lahan, menciptakan propaganda, dan membatasi peredaran biji jarak agar tidak keluar dari daerah penghasilan.

KATA-KATA KUNCI

Jepang; tanaman jarak; Bojonegoro

PENDAHULUAN

Masa pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia berakhir pada saat pasukan tentara Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan. Penyerbuan tentara Jepang yang terjadi pada Januari tahun 1942 berhasil mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur) untuk pertama kalinya, kemudian penyerbuan menyebar ke Balikpapan, Pontianak, Martapura, dan Banjarmasin. Pasukan tentara Jepang bergerak cepat hingga berhasil membuka jalur akses ke Pulau Jawa tepat pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di tiga tempat sekaligus yaitu Kragan, Teluk Banten, dan Eretan Wetan (Sagimun, 1985). Penyerbuan berlanjut menduduki daerah-daerah pedalaman, tepatnya tanggal 5 Maret 1942 pasukan tentara Jepang berhasil menguasai wilayah Bojonegoro (Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988). Penyerbuan tentara Jepang sejauh ini tidak mendapatkan perlawanan baik dari pasukan Belanda maupun pasukan keamanan lainnya karena dirasa kekuatan tentara Jepang lebih besar, akhirnya daerah Bojonegoro berhasil dikuasai. Keadaan ini membuat kedudukan pemerintah Belanda goyah dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan tentara Jepang di Kalijati-Subang pada tanggal 8 Maret 1942 (Sulasman, 2013).

Sementara itu pendaratan di pulau Jawa bertujuan menjadikan pulau Jawa sebagai penopang kebutuhan ekonomi dan pemasok logistik saat perang. Pulau Jawa terdiri atas pedesaan yang sebagian besar mempunyai jumlah penduduk yang tinggi dan tanah yang subur, sehingga potensi ini dianggap bisa membantu memenuhi kebutuhan di medan perang. Tanah yang subur banyak menghasilkan tanaman pangan, sedangkan jumlah penduduk yang tinggi dapat digunakan sebagai pekerja pertanian (Pratiwi, 2006). Melihat potensi tersebut, tentara Jepang berusaha menyesuaikan kembali pertanian rakyat dengan menargetkan beberapa produksi pertanian seperti bahan makanan, bahan serat, dan bahan minyak. Namun usaha peningkatan produksi tersebut terbukti merugikan karena barang-barang tersebut bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tanah dan tenaga kerja (Sato, 2010).

Seiring berjalannya pendudukan, Jepang sangat membutuhkan bahan-bahan pangan sebagai sumber makanan untuk para tentara dan sipil Jepang serta pasukan militer setempat (Sagimun, 1985). Dalam rangka meningkatkan produksi bahan-bahan pangan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan lebih terfokus pada penanaman tanaman pangan terutama padi dan palawija serta tanaman wajib (Pratiwi, 2006). Selain itu, pemerintah juga menjalankan wajib serah hasil panen. Dimana petani dan rakyat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil tanamannya sebanyak 20% kepada pemerintah sebagai sumber perbekalan di medan perang. Dirasa penyerahan hasil bumi masih kurang, petani terpaksa memperluas tanah pertanian dengan membuka hutan-hutan dan perkebunan milik kapitalis Barat serta mereklamasi rawa-rawa (Rachman, 1999). Akibatnya saat itu tanah-tanah perkebunan mengalami kerusakan sehingga terjadi penurunan pada produksi perkebunan.

Di samping itu terdapat kebijakan lain dalam bidang pertanian, yaitu mengusahakan produksi tanaman wajib yang mendukung kebutuhan di medan perang seperti tanaman jarak. Selama pemerintahan Hindia Belanda, tanaman jarak bukanlah tanaman prioritas (Ibrahim, 2004). Bahkan sebelum terjadi perang, tingkat produksi tanaman jarak di Jawa terbatas pada daerah-daerah tertentu, seperti Bojonegoro dan Surakarta. Rata-rata jumlah

produksi per tahun hanya mencapai sekitar 10.000 ton (Kurasawa, 2015). Akan tetapi setelah kedatangan Jepang tanaman jarak mulai dibudidayakan dalam skala besar dan berkali lipat. Hal ini karena biji jarak mengandung minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif minyak pelumas senjata dan mesin-mesin kapal. Selain sebagai pelumas, minyak jarak berguna untuk bahan bakar, menghaluskan kulit, campuran obat sabun dan obat pembersih perut (Asia Raya, 1942). Kegunaan daripada tanaman jarak membuat produksi bahan pangan mengalami penurunan, karena sebagian lahan pertanian banyak yang dialihfungsikan sebagai lahan pertanian jarak (Ahmadin, 2013).

Dalam penelitian ini, Bojonegoro dipilih sebagai salah satu wilayah untuk budidaya tanaman jarak karena susunan tanah berbukit mengandung gamping serta hampir tidak ditemukan saluran irigasi dan mitigasi bencana, kecuali di daerah dataran sungai yang terbilang subur hanya terdapat di Kecamatan Pelem dan Baureno (Penders, 1984). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa di musim hujan tanah gamping tidak bisa menyerap air hujan dengan baik sehingga banyak lahan pertanian yang tergenang air dan terjadi kerusakan pada tanaman pertanian khususnya tanaman pangan (Asia Raya, 1944c). Oleh sebab itu pemerintah berusaha memperbaiki perekonomian rakyat yang sempat melemah dengan menggiatkan penanaman jarak di lahan pertanian.

Demikian minimnya penelitian tentang budidaya tanaman jarak secara mikro yang bertempat di Bojonegoro menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Dari masalah ini menghasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana latar historis Karesidenan Bojonegoro? Bagaimana pemerintah Jepang mengimplementasikan strategi penanaman jarak sebagai dampak kebijakan ekonomi perang di Karesidenan Bojonegoro? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal pertama yang dilakukan penulis adalah melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sezaman yang dibantu dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Melalui pendekatan tersebut penulis mencoba menganalisis fakta-fakta pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan di Karesidenan Bojonegoro selama pendudukan Jepang.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Tahap pertama pemilihan topik, dalam proses ini penulis memilih topik budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro tahun 1942-1945. Pada tahap heuristik atau pengumpulan sumber, sumber yang diperoleh untuk menunjang penelitian antara lain sumber primer meliputi surat kabar Asia Raya, *Sinar Baroe*, dan *Soeara* Asia, serta majalah *Kan Po* dan poster propaganda Jepang yang diakses secara *online*. Sedangkan untuk sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel bertemakan masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Sumber-sumber yang digunakan dinilai relevan dengan situasi dan kondisi selama pendudukan Jepang di Indonesia terutama di wilayah Bojonegoro.

Tahap selanjutnya, melakukan kritik baik kritik *ekstern* maupun *intern* pada sumber-sumber yang ditemukan. Kritik sumber ini dilakukan untuk menelaah sumber-sumber sejarah untuk membuktikan kebenaran dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Pada kritik

intern ditemukan informasi terkait pemerintah Jepang yang menggiatkan budidaya tanaman jarak karena bijinya mengandung minyak yang berfungsi sebagai minyak pelumas. Kemudian tahap interpretasi, yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan topik yang diambil yaitu, ekonomi politik. Melalui pendekatan tersebut akan membantu penulis menganalisis dan memaparkan secara komprehensif menjadi sebuah fakta-fakta sejarah. Fakta yang ditemukan dari sumber primer adalah strategi pemerintah Jepang atas penanaman jarak hanya untuk melipat gandakan hasil jarak yang dilakukan dengan menggiatkan pengelolaan lahan pertanian rakyat Bojonegoro. Selanjutnya tahap historiografi, menyajikan fakta-fakta sejarah yang disajikan dalam bentuk karya tulis sehingga menjadi sebuah rangkaian peristiwa secara sistematis. Fakta-fakta sejarah yang diperoleh akan disusun dan menghasilkan tulisan Budidaya Tanaman Jarak Pada Masa Pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro Tahun 1942-1945. Dalam tulisan ini membahas strategi pemerintah Jepang terhadap budidaya tanaman jarak yang dilakukan dengan menggiatkan pengelolaan lahan pertanian, melancarkan propaganda, dan tindakan pembatasan terhadap hasil pertanian jarak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Historis Karesidenan Bojonegoro

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Wilayah Bojonegoro bagian selatan berbatasan dengan Gunung Pandan. Kemudian bagian barat dan timur berbatasan dengan kabupaten Blora dan Kabupaten Lamongan sedangkan perbatasan di sebelah utara dibentuk oleh gunung Kendeng berupa pegunungan gamping setinggi 900 meter dan Kabupaten Tuban. Pada tahun 1900 Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari Karesidenan Rembang, akan tetapi pada 1 Juli 1928 Bojonegoro membentuk karesidenan tersendiri yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban (Penders, 1984). Kemudian pada tahun 1931 Bojonegoro sempat dimasukkan dalam bagian wilayah Residensi Gresik (Hartono, 2012).

Bojonegoro merupakan daerah yang dekat dengan aliran sungai Bengawan Solo sehingga lahan pertanian di sekitarnya memiliki tanah yang relatif subur. Namun sebagian besar jenis tanahnya termasuk tanah pertanian tandus berupa tanah kapur (Penders, 1984). Terdapat beberapa jenis tanah di Bojonegoro yang terbagi menjadi beberapa area, antara lain tanah sawah basah, tanah sawah kering, tanah hutan jati dan tanah perkampungan. Tanah sawah memiliki jumlah terluas dibandingkan dengan tanah kering maupun tanah hutan jati. Maka dari itu, kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai daerah pertanian yang cukup baik untuk menanam tanaman padi, palawija, tembakau, tebu dan jati (Putri, 2019).

Menurut Penders (1984) pada masa pemerintahan Hindia Belanda Bojonegoro dikenal sebagai daerah termiskin dan mengalami ketertinggalan dalam aspek sosial-ekonominya yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Demikian kondisi wilayah yang sering terjadi bencana alam, seperti banjir dan kekeringan menjadikan petani seringkali mengalami kegagalan panen. Hal ini mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian sehingga penduduk mengalami krisis makanan dan terjadi kelaparan. Meskipun wilayah Bojonegoro cukup terbelakang, tingkat produktivitas sumber daya alamnya masih cukup baik seperti tanaman tembakau, pohon jati dan sumber minyak sehingga hal ini

dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan Bojonegoro termasuk dalam tiga daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia setelah Deli (Sumatra) dan Jember di Jawa (Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988).

Akan tetapi untuk mengurangi kerugian akibat gagal panen, pemerintah Hindia Belanda berupaya memperbaiki perekonomian penduduk, dengan perluasan pembangunan sistem irigasi di area-area perkebunan dan pembangunan infrastruktur modern (Penders, 1984; Putri, 2019). Pembangunan irigasi ini dilatarbelakangi oleh musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan. Pada musim kemarau petani memanfaatkan irigasi untuk tanaman tembakau dengan masa penanaman selama lima bulan. Sedangkan jika pada musim penghujan petani menggunakannya untuk menanam padi dan tanaman palawija yang tidak begitu banyak membutuhkan air (Nasrulloh & Suparwoto, 2014).

Pada awal pendudukan Jepang kondisi perekonomian di Bojonegoro sempat terpuruk sehingga Jepang mengambil alih semua kegiatan ekonomi, atas dasar ingin mengeksploitasi sumber daya yang tersedia untuk persediaan di medan perang. Jepang memulai dengan usaha meningkatkan produktivitas pertanian seperti tanaman padi, jagung dan palawija. Untuk itu pemerintah melancarkan propaganda mengurangi lahan perkebunan tembakau yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan. Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan penanaman bahan industri tekstil seperti kapas, kapuk, randu, serat, rami, dan serat nanas. Utamanya, pemerintah mewajibkan rakyat untuk melakukan penanaman jarak di seluruh tanah-tanah yang tidak terpakai dan menyerahkan hasil pertanian rakyat kepada pemerintah (Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988).

Pengelolaan Lahan

Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru, untuk mendukung kekuasaannya, Jepang perlu mendapat dukungan rakyat yang berfokus pada kegiatan pertanian dan perkebunan (Riady et al., 2022). Kondisi perekonomian di Bojonegoro saat itu sedang terpuruk ditambah tingkat produktivitas pertanian masih sangat rendah. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah kolonial terhadap pertanian masyarakat seperti kurangnya inovasi dalam bidang pertanian (Asia Raya, 1944c). Akibatnya penghasilan rakyat Bojonegoro berkurang dan mengalami krisis pangan. Di sisi lain rendahnya hasil pertanian di Bojonegoro juga dipicu dengan bencana banjir yang kembali terjadi pada tanggal 15-16 November 1942 sehingga banyak pertanian rakyat yang mengalami kerusakan (Asia Raya, 1943c). Kondisi tersebut membuat pemerintah Jepang terpaksa membebaskan rakyat dari pajak tanah (Kan Po, 1942a). Penghapusan pajak tanah dilakukan agar para petani yang baru terkena bencana bisa menggunakan modalnya untuk membuka pertanian baru. Jika pajak tetap berjalan dikhawatirkan para petani tidak mampu membayar dan malah mengurangi hasil produksi pertaniannya.

Untuk mengatasi rendahnya hasil pertanian rakyat, pemerintah melakukan pembukaan lahan baru atau mengubah fungsi lahan. Akibatnya banyak tanah perladangan, persawahan hingga halaman rumah dialihfungsikan menjadi perkebunan jarak (Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988). Perihal pengelolaan lahan pertanian,

pemerintah menugaskan *Sangyobu*[1] untuk bertanggung jawab atas pembagian bibit jarak, pemberitahuan tentang luas tanah setiap *Syu* (Karesidenan) dan menentukan jumlah kuota yang harus dipenuhi (Kurasawa, 1993). Di Bojonegoro pemerintah telah menentukan luas lahan pertanian yang akan ditanami jarak. Melalui kantor *Syu* (Karesidenan), *Sangyobu* mengabarkan kepada petani maupun rakyat bahwa dalam tahun 1942 perladangan di daerah Bojonegoro akan ditanami jarak dengan lahan seluas 16.000 ha. Begitu pula di tahun 1943, tanah-tanah tersebut akan diperluas hingga area dataran tinggi untuk menghindari genangan air yang meluap dari Sungai Bengawan Solo pada musim penghujan. Berdasarkan ketentuan itu pemerintah telah menyiapkan tanah yang nantinya akan ditanami jarak di area dataran tinggi seluas 40.000 ha (Soeara Asia, 1942). Di samping itu *Sangyobu* telah menentukan kuota bibit jarak yang akan ditanam petani maupun rakyat di Bojonegoro, yaitu sebanyak tujuh bibit per orang (Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988).

Ketentuan lahan pertanian jarak di tingkat karesidenan maupun kabupaten berbeda-beda karena pemerintah menyesuaikan pada ketersediaan lahan setempat. Seperti yang terjadi di kabupaten Sragen, dimana pada tahun 1943 pemerintah menetapkan luas lahan pertanian jarak seluas 9.000 ha yang terdiri atas 7.000 ha dari tanah tegalan, 1.000 ha di lahan sawah, 600 ha tanah-tanah bekas tanaman tebu, dan 800 ha dari halaman-halaman rumah penduduk dengan ketentuan setiap rumah akan menanam jarak sebanyak 200 pohon. Untuk harga pembelian pemerintah menetapkan harga biji jarak sebesar ƒ 8.20/kwintal (Asia Raya, 1943a).

Dirasa hasil produksi jarak masih kurang, pemerintah Jepang juga mengusahakan sebagian tanah di taman-taman kota untuk perkebunan. Tercatat taman-taman kota di seluruh Jawa sebanyak 120 lokasi yang masing-masing luasnya sekitar 4000 m^2 dan terdapat sejumlah tanah kosong di sekitarnya. Pada rencana pemerintah, tanah-tanah yang kosong itu akan digunakan sebagai perkebunan jarak. Bahkan hampir seluruh tanah kosong di taman kota Pulau Jawa telah ditanami sejumlah 12.000 pohon jarak dengan kuota yang harus ditanam kurang lebih 15.000 pohon (Asia Raya, 1944b).

Propaganda untuk Memperbanyak Hasil Jarak

Sejak terjadinya perang Pasifik kebutuhan akan minyak pelumas semakin meningkat pesat. Untuk meningkatkan produksi jarak pemerintah melancarkan propaganda yang sifatnya menarik, karena Jepang tahu betul bahwa tanpa adanya peran rakyat usaha meningkatkan produksi jarak tidak akan berjalan lancar. Propaganda dilakukan dengan menyebarkan seruan-seruan atau kampanye melalui beberapa media seperti koran, majalah, pidato *Gunseikan*[2], poster dan siaran radio. Propaganda ini bertujuan agar petani maupun rakyat bersedia untuk menanam tanaman jarak di lahan pertanian maupun perkebunan (Asia Raya, 1944d). Selain itu pemerintah membentuk sebuah lembaga yang akan memberikan penyuluhan dan bimbingan langsung kepada petani maupun rakyat desa yaitu *Jarak Shindoin* (Kurasawa, 1993).

---

[1] Salah satu departemen dalam susunan pemerintah militer pada masa pendudukan Jepang, *Sangyobu* merupakan Departemen Perusahaan, Industri, dagang, pertanian dan Kerajinan Tangan, dalam "Soesoenan-soesoenan departemen dan pedjabatan-pedjabatan Pemerintah Sentral"

[2] *Gunseikan* merupakan istilah dari Kepala Pemerintah Militer pada masa pendudukan Jepang

Melalui lembaga "*Jarak Shindoin*", pemerintah memberikan bimbingan dalam penanaman jarak. Secara umum mekanisme budidaya tanaman jarak yang harus dilakukan sebelum menanam, petani atau rakyat harus mengetahui kondisi iklim dan tanah untuk menyesuaikan jenis bibit jarak yang akan ditanam. Selanjutnya tanah yang akan ditanami bibit haruslah dicangkul lebih dulu dan membuat lubang sedalam 3-5 cm nantinya setiap lubang ditanami bibit 1-2 biji (Sinar Baroe, 1944a). Kemudian untuk perawatan tanaman, hanya diberikan pupuk organik namun alangkah baiknya pemupukan dilakukan ketika sedang mempersiapkan tanah sebelum ditanami. Ketika buah jarak siap dipanen, pemetikan buahnya dilakukan jika kulitnya sudah berubah menjadi kecoklatan, hal itu menandakan bahwa buahnya sudah masak atau matang (Asia Raya 1944a). Hasil produksi nantinya akan diserahkan kepada pemerintah dan disetorkan ke pabrik *gemoek* yang dihargai sejumlah uang.

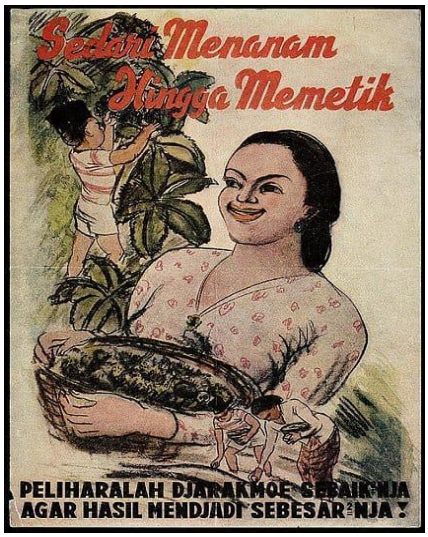

Gambar 1. Poster Propaganda Jepang dari Perang Dunia II (1942-1945)
Sumber: NIOD (1942)

Dalam memperbanyak hasil jarak pemerintah juga melakukan kampanye dengan berkeliling desa-desa. Sekitar 20.000 selebaran dan 10.000 poster telah disebarkan oleh *Sendenbu.*[3] Selebaran di atas menggambarkan kegiatan *Fujinkai Djakarta Tokubetsu Shi*[4] yang sedang memetik buah jarak. Selebaran dan poster ini disebarkan ke seluruh Karesidenan Jawa termasuk Bojonegoro (Asia Raya, 1945) (Gambar 1). Melalui selebaran ini pemerintah mengajak dan menganjurkan masyarakat untuk menanam jarak di lahan-lahan kosong, selain itu untuk menarik simpati masyarakat agar dengan sukarela membagi sebagian tanah pertaniannya. Kemudian hasil jarak akan diserahkan kepada pemerintah melalui kantor *Syu* (Karesidenan) dan akan dibayar dengan harga yang sesuai di tempat penghasilan. Harga penjualan jarak yang telah ditetapkan antara lain Probolinggo seharga ƒ

[3] Dalam susunan pemerintah pusat *Sendenbu* merupakan sebutan untuk Departemen Propaganda, dalam "Soesoenan Gunseikanbu"

[4] *Fujinkai Djakarta Tokubetsu Shi* merupakan organisasi perempuan yang dibentuk di Kotapraja Jakarta, dalam "Oesaha Menggiatkan Penanaman Djarak"

7,50/ 100 kg, Lamongan dihargai ƒ 8,00/ 100kg, dan di Solo dengan harga ƒ 8,50/ 100 kg (Kan Po, 1943a).

Propaganda penanaman jarak tidak hanya melalui pamflet dan poster. Sejak bulan Januari 1943 di Bojonegoro *Syu* (Karesidenan) pemerintah mengadakan "*Sajembara Djarak*", mengingat situasi peperangan yang semakin melemahkan kekuatan Jepang. Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk menggiatkan penanaman jarak di tanah-tanah yang kosong dan kebun-kebun yang sedang tidak terpakai. Sayembara ini berhasil diikuti sebanyak 117 peserta dari berbagai daerah di Jawa, akan tetapi hanya 18 diantaranya yang memenuhi syarat. Dalam sayembara pemerintah telah menyiapkan tiga hadiah, bagi siapa yang bisa menghasilkan biji jarak dengan kualitas bagus dan memberi nama buah jaraknya serta membuat semboyan tentang menggiatkan penanaman jarak akan mendapat hadiah berupa uang. Hasil sayembara mengumumkan tiga pemenang antara lain hadiah pertama uang sebesar ƒ 25,00 diberikan kepada nyonya Ramelan dari Surabaya, buah jaraknya dinamai "*Redjeki*" dengan semboyan "*Asia Raja lekas terdjadi, djika paman tani gemar menanam redjeki*". Selanjutnya hadiah kedua mendapat uang sebesar ƒ 15,00 diberikan kepada tuan Soegiman pegawai *Jobin Kjokoe* di Blimbing (Malang), dimana buah jarak miliknya dinamai "*Fadjar*" dengan semboyan "*Memperloeas bidji fadjar oentoek bapak tani jang sedari mengerti bahwa djaman soedah beredar"*. Sedangkan hadiah ketiga mendapatkan uang sebesar ƒ 10,00 yang diberikan kepada tuan Moestari dari Sekolah Rakjat Gesang (Tempeh), ia menyebut buah jaraknya dengan sebutan "*Moestika*". Tidak lupa semboyan-nya yang berbunyi "*Bermoestika sebanjak-banjaknja berarti berbahagia selam-lamnja*". Sementara itu terdapat peserta lain dengan semboyan lebih unik dan menarik yaitu milik tuan Djadjeri dari Lamongan, semboyannya berbunyi "*Bapak tani, marilah toeroet menjoesoen negeri. Bekerdja giat oentoek menambah hasil boemi. Mari kita menanam djarak bersama-sama. Oentoek menambah kemakmoeran Asia Raja*". Akan tetapi sangat disayangkan beliau tidak mendapatkan hadiah karena tidak memberikan nama pada buah jaraknya (Asia Raya, 1943b).

Pemerintah terus menerus melancarkan propaganda yang berlangsung selama masa pendudukan di Jawa (Kurasawa, 1993). Propaganda lain yang dilakukan pemerintah yakni, dengan mengadakan "Pekan Menambah Hasil *Djarak*" di seluruh tanah Jawa selama satu minggu penuh. Peserta yang mengikuti pekan penanaman jarak terdiri dari berbagai kalangan, diantaranya murid-murid sekolah, *Fujinkai*[5], *Keibodan*[6], pegawai pemerintah dan para Kiai. Area lahan yang digunakan antara lain, sepanjang tepi jalan, area hutan-hutan yang dialihfungsikan, dan tanah-tanah pabrik yang tidak terpakai serta halaman rumah penduduk. Di sisi lain, untuk mendukung propaganda, pemerintah mengusahakan tanah-tanah perkebunan dipakai untuk penanaman jarak. Sementara itu dalam pengumpulan buah jarak nantinya akan dikerjakan oleh murid-murid sekolah (Sinar Baroe, 1944b).

[5] *Fujinkai* merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan perempuan dan wanita Indonesia. *Fujinkai* bertugas membantu tentara Jepang dalam menyelesaikan masalah peperangan

[6] *Keibodan* merupakan barisan pemuda yang bertugas membantu kepolisian menjaga keamanan

Tindakan Pembatasan dan Strategi lainnya

Demi menjaga produksi tanaman jarak, pemerintah semakin memperketat peredaran biji jarak di seluruh Jawa termasuk daerah Bojonegoro. Dilansir dari koran Asia Raya (1943d) pemerintah melarang peredaran hasil bumi keluar dari daerah penghasilan. Hasil bumi yang dilarang meliputi, beras, padi, jagung, biji jarak, dan rokok-rokok. Tindakan pembatasan dilakukan karena pemerintah menganggap barang-barang hasil bumi penting dan membantu kebutuhan saat perang. Akan tetapi jika terpaksa harus dikirim keluar daerah penghasilan, petani maupun rakyat perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Demikian jika hasil bumi keluar dari daerah penghasilan dikhawatirkan bisa mengurangi target kuota yang telah direncanakan pemerintah.

Bentuk penekanan serupa juga dilaksanakan di daerah Surakarta dimana pembatasan terhadap barang-barang yang membantu kebutuhan saat perang tidak diizinkan keluar daerahnya termasuk hasil penanaman jarak (Kan Po 1943b). Mengingat kebutuhan minyak pelumas semakin meningkat pemerintah berusaha keras untuk melipat gandakan biji jarak dan tidak segan dalam memberikan hukuman bagi yang melanggar strategi tersebut.

Pemerintah menganjurkan penanaman jarak mulai pada bulan Maret setelah panen padi. Pemerintah membayar hasil panen jarak dengan harga yang relatif baik sehingga bisa dijadikan penghasilan tambahan bagi petani karena tanaman sebelumnya sulit mendapatkan harga pasar (Kurasawa, 1993). Namun penjualan jarak kepada pemerintah tidak dibayar sesuai harga yang telah ditetapkan seperti yang terjadi di daerah Semarang *Syu* (Karesidenan), petani jarak yang berhasil menanam dan memanen tidak dihargai dengan sejumlah uang melainkan ditukar dengan beberapa liter minyak tanah. Setiap petani jarak yang melakukan penyetoran sebanyak 10 kg akan dibayar dengan 1 liter minyak tanah (Asia Raya, 1944e). Namun terkadang persediaan minyak tanah dari pemerintah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat saat itu. Pembelian dengan cara menukarnya dengan minyak tanah adalah strategi pemerintah Jepang agar masyarakat tidak lagi menggerus biji jarak sebagai minyak penerangan. Sementara itu penggunaan biji jarak sudah sejak lama digunakan sebagai bahan penerangan di rumah-rumah penduduk.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro menyebabkan perubahan dalam bidang pertanian. Mengingat kondisi perekonomian Bojonegoro yang sedang terpuruk dimanfaatkan pemerintah untuk melancarkan kebijakan ekonomi perang. Akan tetapi seiring pendudukan, Jepang menambahkan tanaman wajib yang harus ditanam yaitu tanaman jarak. Tanaman jarak merupakan tanaman yang bijinya mengandung minyak yang berguna sebagai minyak pelumas. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melancarkan strategi atas penanaman jarak di Karesidenan Bojonegoro. Strategi atas penanaman jarak dilakukan hanya untuk meningkatkan produktivitas tanaman jarak yang mengarah pada pengelolaan lahan pertanian rakyat. Dalam melancarkan penanaman jarak, pemerintah menciptakan propaganda yaitu dengan berkampanye dan mengadakan perlombaan untuk menarik simpati rakyat agar bersedia menyisihkan sebagian lahan pertanian untuk penanaman jarak. Selain itu dalam mengusahakan budidaya tanaman jarak pemerintah juga membatasi

kegiatan pengedaran hasil bumi termasuk biji jarak. Pembatasan dari pemerintah sangat menyulitkan rakyat Bojonegoro karena seluruh hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah tanpa mendapatkan bayaran yang sepadan. Namun di lain sisi, adanya strategi penanaman jarak ini menguntungkan rakyat Bojonegoro karena telah diperkenalkan teknik dan inovasi pertanian modern, penggunaan sistem irigasi, dan pendidikan yang layak.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmadin. (2013). *Sejarah agraria: sebuah pengantar*. Rayhan Intermedia.

Asia Raya. (1942, June 27). *Kegunaan minjak djarak*. 3.

Asia Raya. (1943a, January 6). *Pengelolaan lahan di Kabupaten Sragen*. 3.

Asia Raya. (1943b, January 15). *Sajembara djarak*. *13*, 13–16.

Asia Raya. (1943c, January 22). *Memperbaiki perekonomian Bodjonegoro*.

Asia Raya. (1943d, February 3). *Semoea hasil boemi tidak boleh keloear*. 3.

Asia Raya. (1944a, March 4). *Keterangan gunseikanbu sangjoboetjo tentang djarak*. 3.

Asia Raya. (1944b, March 4). *Taman-taman si sebagian didjadikan perkebunan djarak*. 2.

Asia Raya. (1944c, March 16). *Bodjonegoro dulu dan sekarang*.

Asia Raya. (1944d, April 1). *Seruan tanamlah djarak*. 3.

Asia Raya. (1944e, August 25). *Para penanam djarak mendapat minjak*.

Asia Raya. (1945, March 28). *Kampanye menggiatkan penanaman djarak*. 2.

Hartono, M. (2012). Realisasi Politik Etis Bojonegoro pada Awal Abad XX: Kajian Sosial Ekonomi. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 1–18.

Ibrahim, J. (2004). Eksploitasi ekonomi pendudukan Jepang di Surakarta (1942-1945). *Humaniora*, *16 No. 1*.

Kan Po. (1942, August). *Peroebahan tata pemerintahan daerah*.

Kan Po. (1943a, February). *Rentjana gunseikanbu tentang tanaman djarak*. No. 13.

Kan Po. (1943b, May). *Barang-barang jang tidak boleh keloear Soerakarta kooti*. No. 21.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.

Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan kontrol: studi tentang perubahan sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945*. Grafindo.

Kurasawa, A. (2015). *Kuasa Jepang di jawa: perubahan sosial di pedesaan 1942-1945*. Komunitas Bambu.

Nasrulloh, R. I., & Suparwoto. (2014). Pembangunan dan pengaruh waduk pacal terhadap pertanian masyarakat kabupaten bojonegoro tahun 1927-2000. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *2*(3), 90–103.

NIOD. (1942). *Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indie (1942-1945)* (p. 1). NIOD Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands.

Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro. (1988). *Sejarah Kabupaten Bojonegoro (menyingkap kehidupan dari masa ke masa)*. Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Bojonegoro.

Penders, C. L. M. (1984). *Bojonegoro 1900-1942: a story of endemic poverty in north-east Java-Indonesia*.

Pratiwi. (2006). Politik pangan di Surakarta pada Masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. *UNS: Jurusan Ilmu Sejarah*.

Putri, J. R. (2019). *Perkembangan Waduk Pacal dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Bojonegoro Tahun 1927-1998*.

Rachman, F. N. (1999). *Petani dan penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia*. Pustaka Belajar.

Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S. (2022). *Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945*. *2*(Oktober), 487–502.

Sagimun, M. D. (1985). *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Inti Idayu Press.

Sato, S. (2010). *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Vol. 4, Issue 1). BRILL.

Sinar Baroe. (1944a, March 11). *Pekan penanaman djarak*.

Sinar Baroe. (1944b, August 29). *Haroes diperhatikan penanaman djarak*. 5.

Soeara Asia. (1942, December 29). *Bodjonegoro: 40.000 ha ladang ditanami djarak*. 2.

Sulasman. (2013). Panasnya matahari terbit derita rakyat Sukabumi pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *5*(3), 431. https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i3.97